

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Laporan keuangan menurut PSAK No. 1 Tahun 2015 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, sedangkan tujuan pembuatan laporan keuangan yaitu, memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Maka dari itu laporan keuangan yang baik harus memenuhi syarat-syarat antara lain relevan, jelas, dan dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan. Syarat-syarat laporan keuangan yang baik ini sering juga disebut dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Menurut Faishal dan Hadiprajitni (2015), ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan merupakan salah satu kendala yang sering dialami oleh perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan yang relevan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan karakteristik penting bagi laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan yang dilaporkan secara tepat waktu akan mengurangi resiko ketidaksesuaian penafsiran informasi

yang disajikan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke publik adalah sebagai sinyal dari perusahaan yang menunjukkan adanya informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan untuk pembuatan keputusan dari investor (Raesya et al., 2010). Keterlambatan pelaporan keuangan juga akan menghilangkan nilai informasi dari laporan keuangan tersebut karena tidak tersedia saat pemakai laporan keuangan membutuhkan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Bagi perusahaan publik yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat umum dan diperdagangkan di bursa, ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan harus dipenuhi oleh perusahaan. Menurut Christine (2012) keterlambatan atas penyampaian laporan keuangan auditan akan berdampak pada informasi laporan keuangan yang nantinya akan merugikan investor. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan minimal sekali setahun. Hal ini ini bertujuan agar pengguna informasi mendapatkan manfaat dari laporan keuangan yang relevan dengan pelaporan keuangan tepat waktu mengingat pentingnya laporan keuangan yang relevan.

OJK telah mengeluarkan peraturan mengenai batasan waktu pelaporan keuangan untuk melindungi kepentingan pemegang saham yang dituangkan dalam peraturan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. OJK mewajibkan setiap perusahaan *go*

public yang terdaftar di Bursa Efek wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Menurut Masithoh (2011) dalam wijaya (2012), proses audit cukup membutuhkan waktu, bahkan jika diperlukan auditor dapat memperpanjang masa audit agar informasi keuangan yang disampaikan akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Lamanya waktu penyelesaian audit diukur dari berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit (tanggal opini) selanjutnya disebut *Audit Report Lag*. Landsman, Maydew, & Thronock (2012) menyatakan bahwa *audit lag* merupakan penentu paling penting dari ketepatan waktu dalam pengumuman laba, yang pada saatnya akan menentukan reaksi pasar terhadap pengumuman laba.

Ketepatan penyampaian laporan keuangan sebenarnya mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan. Noviantini dan Fatimah (2013) serta Subandono (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik akan meningkatkan keandalan informasi keuangan bagi para *stakeholder*. Prinsip *corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan faktor penting dalam menyajikan informasi yang relevan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2012), GCG memiliki lima prinsip yang perlu diperhatikan oleh

perusahaan yaitu transparansi atau keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan, akuntabilitas atau pertanggungjawaban kinerja perusahaan secara transparan dan wajar, responsibilitas atau pertanggungjawaban kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap perundang-undangan yang berlaku, independensi atau pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun, dan kewajaran/kesetaraan atau memberikan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*. Penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap dewan direksi/manajemen.

Mekanisme CG ditandai dengan adanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit. Kepemilikan manajerial diyakini dapat mengurangi dan membatasi perilaku manajemen. Manajer akan cenderung menjaga kredibilitas perusahaannya dengan mengungkapkan dan menyampaikan pelaporan keuangan secara akurat dan tepat waktu. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Efrianti, 2012).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji mengenai pengaruh komponen-komponen tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat mengurangi *audit*

report lag. Penelitian ini mengacu pada penelitian Faishal dan Hadiprajitno (2015) mengenai “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap *Audit Report Lag*” yang mana *audit report lag* sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen terdiri atas ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan rapat komite audit.

Ukuran dewan Komisaris merupakan salah satu komponen dari *corporate governance* yang dapat mempengaruhi *audit report lag* perusahaan. Menurut Faishal dan Hadiprajitni (2015) dewan komisaris memiliki fungsi melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Hasil dari penelitian Faishal dan Hadiprajitni (2015) menyatakan bahwa variabel dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Dewan Komisaris Independen merupakan salah satu komponen dari *corporate governance*. Adanya dewan komisaris independen dengan presentase yang tinggi dalam perusahaan diindikasikan dapat mengawasi perilaku *opportunistic* manajemen, meningkatkan kualitas pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan dan mengurangi manfaat dari menyembunyian informasi (Swami dan Latrini 2013). Hasil penelitian dari Faishal dan Hadiprajitni (2015) menyatakan bahwa komisaris independen

berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Penelitian tersebut didukung oleh Afify (2009) berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, Naimi (2010) yang dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *audit report lag*. Namun berbeda dengan penelitian pada Swami dan Latrini (2013) dan Adrian (2015) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Ukuran Komite Audit merupakan salah satu komponen dari *corporate governance*. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (OJK Nomor 55/POJK.04/2015). Dalam peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 juga mengatur tentang jumlah komite audit bagi emiten dan perusahaan publik serta mewajibkan perusahaan publik membentuk komite audit yang berjumlah paling sedikit tiga orang. Hasil penelitian Faishal dan Hadiprajitni (2015) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. pernyataan ini juga didukung oleh Naimi (2010) yang menyatakan bahwa ukuran komite Audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Rapat Komite Audit merupakan salah satu komponen dari *corporate governance*. Didalam peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 dinyatakan bahwa, komite audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya

satu kali dalam tiga bulan. Hasil penelitian Faishal dan Hadiprajitni (2015) menyatakan bahwa rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wardhani (2013) yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Audit Report Lag (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?

1.3. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018.
2. Unsur *corporate governance* yang diamati dalam penelitian ini adalah, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Jumlah Rapat Komite Audit.
3. Variabel dewan komisaris diproksikan dengan ukuran dewan komisaris dan variabel komite audit diproksikan dengan ukuran komite audit.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan bagi peneliti selanjutnya maupun bagi pengembang teori perilaku di dalam literatur akuntansi mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *audit report lag*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan bisa dijadikan perbandingan untuk menambah wawasan terkait *audit report lag*.

2. Manfaat untuk Bidang Praktik

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, wawasan dan memberikan pemahaman lebih mendalam bagi para auditor maupun para akuntan profesional mengenai hubungan *corporate governance* yang meliputi ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan rapat komite audit dengan *audit report lag*.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dalam menyusun strategi pelaporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan *corporate governance* agar mampu mendorong pengoptimalan pengendalian *audit report lag* agar pelaporan keuangan auditan bisa dilakukan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

1.6. Kerangka Penulisan

Kerangka penulisan skripsi dibagi menjadi 5 bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yang meliputi, latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta kerangka penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang: landasan teori, hasil penelitian terdahulu, serta hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi uraian tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, serta jenis dan sumber data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan serta keterbatasan penelitian.

